

Penanaman Nilai Pancasila dan Semangat Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Alfian Fahrurrozhi^{a,1}, Dwi Oktaviani^{b,2}, Dwi Indah Lestari^{c,3}

^a Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta and 55161, Indonesia

^b Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta and 55161, Indonesia

^c Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta and 55161, Indonesia

^{1*} alfifian060@gmail.com; ² dwioktaviani904@gmail.com; ³ dwindahl1707@gmail.com

* Corresponding Author

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 13/5/2021

Direvisi: 19/7/2021

Disetujui: 27/11/2021

Tersedia Daring: 1/12/2021

Kata Kunci:

Historis

Semangat kebangsaan

Generasi Muda

ABSTRAK

Secara historis, pendidikan telah memberikan peran yang sangat penting dalam mengembangkan nilai semangat kebangsaan dalam masyarakat Indonesia pada setiap orang. Pada masa sekarang pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, memiliki peran yang efisien dan penting serta berkontribusi penuh untuk melestarikan, dan meningkatkan nilai-nilai ideologis negara dan nasionalisme pada generasi penerus bangsa. pendidikan multikulturalisme dan konflik pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan harus dipahami semaksimal mungkin guna meningkatkan efisiensi generasi penerus. Ini berarti mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah sosial secara kritis dan analitis serta menerapkan semangat ideologi dan nilai-nilai nasionalisme. Oleh karena itu. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan sebagai transmisi tetapi juga diajarkan sebagai penyelidikan reflektif. Untuk itu, Indonesia mulai memperkuat pendidikan kewarganegaraan, mengintegrasikan pendekatan langsung dan tidak langsung pada pendidikan nilai dan mengharapkan siswa untuk menginternalisasi ideologi nasional dan nilai-nilai nasionalis sebagai keyakinan. Selain itu, beberapa prinsip proses belajar mengajar yang kuat juga harus dikomunikasikan kepada warga sekolah Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Historical

Nationalism

Young Generation

Instilling the values of Pancasila and the spirit of nationalism through civic education. Historically, education has played an important role in developing the value of nationalism in Indonesian society for everyone. Currently, education, especially civic education, has an efficient and important role and fully contributes to preserving, and enhancing the ideological values of the state and nationalism in the nation's next generation. multiculturalism education and educational conflict. Citizenship education must be understood as fully as possible in order to increase the efficiency of the next generation. This means teaching students to solve social problems critically and analytically and to apply the spirit of ideology and values of nationalism. Therefore, civic education is taught not only as an intermediary, but also as a reflective inquiry. To that end, Indonesia is starting to strengthen civic education, integrating direct and indirect approaches to values education and expecting students to internalize national ideology and nationalist values as beliefs. Furthermore, several principles of a strong teaching and learning process must also be communicated to Indonesian school residents.



How to Cite: Fahrurrozhi, A., Oktaviani, D., & Lestari, D. (2021). Penanaman Nilai Pancasila dan Semangat Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 1(2), 62-71. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v1i2.1588>

1. Pendahuluan

Mungkin pernah tersirat didalam pikiran mengapa Indonesia dijajah oleh bangsa lain dalam waktu yang lama bahkan hingga berabad-abad, penguraian secara mendetail tentang apa penyebab utama Indonesia di jajah oleh bangsa lain berpatokan pada rendahnya pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu (Sallamah & Dewi, 2021). Rendahnya angka pendidikan di Indonesia menjadi pemicu utama dalam rendahnya sumber daya manusia yang ada, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan teknologi baik dalam persenjataan maupun teknologi yang lain. Pendidikan yang rendah juga berpengaruh terhadap pola pikir suatu masyarakat, pada zaman dahulu memilih pemimpin hanya mengedepankan kharisma seseorang itu sendiri dan apabila pemimpin tersebut meninggal maka perjuangannya pun akan berhenti karena tidak ada penerus yang melanjutkannya. Dengan wawasan yang kurang luas menyebabkan para pejuang kemerdekaan hanya memperjuangkan kemerdekaan daerah masing-masing tanpa memikirkan bahwa dengan mereka bersatu akan menjadikan kekuatan yang lebih besar, apalagi kurangnya persenjataan di Indonesia (Rusmiati & Dewi, 2021).

Namun, pada abad -19 ketika masyarakat sudah banyak yang mengenyam pendidikan, cara berpikir pada masyarakat sudah mulai berbeda, wawasan yang didapat juga semakin menyeluruh namun kalangan terdidik masih sangat terbatas, karena minimnya masyarakat yang mengedepankan pendidikan pada masa itu. Kalangan-kalangan terdidik mulai mempengaruhi masyarakat sekitar agar pandangan mereka terhadap jiwa Semangat kebangsaan mulai terbuka hal tersebut sedikit demi sedikit mulai menyebar di kalangan masyarakat. Untuk membuka pikiran masyarakat terhadap nilai kebangsaan tersebut tidak sedikit yang mencela dan tidak mempercayai kalangan terdidik karena dianggap menggurui masyarakat kalangan bawah, namun sedikit demi sedikit masyarakat mulai terpengaruh dan bersatu untuk Indonesia. Awal abad 20, menjadi fase utama bangkitnya Semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Terjadinya insiden sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 kalangan terdidiklah yang menegaskan peristiwa tersebut, serta di patenkannya dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan (Pertiwi & Dewi, 2021).

Peristiwa penting yang terjadi sekitar Proklamasi Kemerdekaan ialah di pastikan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang sah. Pancasila yang pada saat itu adalah kesepakatan politik yang pasti dari leluhur berbeagai macam bangsa yang bisa memfasilitasi nilai yang terkandung pada dasar negara (Rahman, 2018). Di-era masa kini, masih banyak pertanyaan apakah pendidikan masih mempunyai nilai yang berarti bagi negara? Serta apakah pancasila masih menjadi identitas asli bangsa Indonesia? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal namun belum bisa terjawab, ditambah lagi rasa cinta terhadap tanah air yang semakin lama semakin pupus dan mulai terlupakan (Wardana et al., 2021).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini menggunakan studi literatur yang bersumber dari berbagai karya tulis dalam berbagai bentuk seperti blog, artikel, karya ilmiah dan masih banyak lagi, hal ini di lakukan agar informasi yang didapat tidak hanya

bersumber pada satu informasi saja. Dalam informasi yang didapat terdapat berbagai macam pengetahuan yang kami rangkum menjadi satu agar lebih informatif dan dapat memberi pembelajaran bagi pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penanaman nilai pancasila dan semangat kebangsaan melalui Pendidikan akan menghadapi berbagai macam rintangan dalam pelaksanaannya hal ini tidak lain dari pola pikir masyarakat yang masih jauh dari kata sadar akan pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila dari sejak kecil. Berikut adalah upaya yang tepat dalam menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui Pendidikan Kewarganegaraan pada masa globalisasi.

Rintangan yang akan dihadapi

Selama 77 tahun Indonesia merdeka nyatanya Indonesia masih mengalami berbagai rintangan yang bertautan dengan usaha penerapan nilai nilai pancasila dan kebangsaan pada negara Indonesia. Terdapat berbagai nilai yang terdapat dalam sila pancasila salah satunya adalah yang pertama, nilai-nilai pancasila belum terlalu mendarah daging oleh masyarakat Indonesia, Pancasila hanya menjadi identitas yang tidak diterapkan oleh bangsa nya sendiri. Kedua, kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya pada era masa kini mendapat otoritas yang lebih kuat oleh budaya dari luar, hingga terdapat banyak kelakuan dan tingkah laku yang tidak setujuan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, nilai-nilai pancasila oleh beberapa pihak diperhatikan mengalami pengikisan pada saat ini, terutama dalam berbagai generasi penerus bangsa. Keempat, bertumbuhnya paham tentang keagamaan yang tidak menghormati nilai Semangat kebangsaan pada negara Indonesia, dan lebih menghormati nilai universalisme (Eddy, 2018). Pengikut paham ini juga tidak mendukung demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dilihat baik dan pada akhirnya tidak melihat pancasila sebagai sebuah identitas bangsa. Kelima, masih harus dipertanyakan baik pengaruh Pendidikan dalam jalur formal hingga pendidikan non-formal memiliki penghayatan nilai pancasila, hingga nilai Semangat kebangsaan terhadap warga negara Indonesia, terkhusus generasi penerus bangsa.

Penghayatan nilai Pancasila dan Semangat kebangsaan dari dulu sampai sekarang

Ideologi negara yaitu Pancasila telah disetujui oleh the founding fathers mulai awal tahun 1945, walaupun nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila bukan hanya memberikan penghayatan khususnya terhadap warga negara-nya sendiri, hingga dalam beberapa waktu pancasila terlihat hanya sebagai pernyataan simbolis negara tanpa penerapannya. Hal ini terjadi baik dalam kehidupan ketatanegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat (Sakinah & Dewi, 2021). Interpretasi pancasila pun bergantung pada sekumpulan seseorang, bahkan tergantung kendali arus politik yang berkuasa pada saat itu. Upaya adanya penghayatan nilai-nilai pancasila telah diberlakukan pada masa pemerintahan presiden soekarno di awal tahun 1960, dalam kerangka nation and character building. Usaha yang diberlakukan untuk menjadikan masyarakat memiliki rasa cinta terhadap negara Indonesia harus disesuaikan dengan tujuan politik yang berkuasa pada saat itu. Oleh karenanya materi-materi yang diberikan tidak hanya berhubungan tentang pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melainkan materi politik penguasa tersebut. Upaya meningkatkan semangat Semangat kebangsaan dan juga jiwa kebangsaan pada masyarakat Indonesia yang sangat kuat, hingga tokoh Azyumardi Azra adalah fase kedua berkembangnya nilai Semangat kebangsaan pada bangsa Indonesia.

Pada masa Azyumardi azra upaya nation and character building itu tidak hanya diterapkan pada masyarakat umum, namun dilakukan oleh berbagai jalur Pendidikan contohnya melalui mata pelajaran Civics. Sejarah menuliskan bahwa pada periode berikutnya yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat rezim orde lama yang dianggap sebagai sebuah usaha pendoktrinan (Alaby, 2019).

Pada awal masa orde baru berwenang, memiliki ambisi yang paling utama adalah penerapan nilai Pancasila dan nilai Semangat kebangsaan melewati jalur umum formal yaitu Pendidikan, pada saat kurikulum Pendidikan diganti ke awal tahun 1968, bahwa pergantian tentang mata pelajaran ini meningkatkan tujuan penguatan terhadap warga negara Indonesia teratur dapat mendapatkan perubahan. Pendidikan Kewarganegaraan pun ikut masuk dan berpartisipasi dalam kurikulum pendidikan sebagai mata pelajaran wajib bagi pelajar di Indonesia dan materi yang dibahas berisi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibebaskan dari pengaruh Orde lama.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Semangat kebangsaan melalui jalur formal lebih di pertegas dengan adanya kurikulum 1975, dalam kurikulum tersebut terdapat mata pelajaran Pendidikan moral dan Pancasila atau lebih dikenal dengan PMP sebagai pengganti mata pelajaran PKN. Dari perubahan nama tersebut jelas tersirat dengan adanya pelajaran PMP diharapkan siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menerapkan nilai Pancasila secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat dari berbagai tingkat dilakukan oleh para pejabat orde baru dengan dipergunakan adanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau (P4).

Para eksalasi penataran P4 pada waktu itu, sudah menerapkan bermacam-macam pengembangan langkah dan metode yang lebih baik dari pada pendoktrinan. Akan tetapi dikarenakan penataran P4 yang terlihat mayoritas dan uraian Pancasila yang dilihat sepele oleh pejabat, akhirnya penataran P4 ini oleh kaum yang mendukung era reformasi dilihat sebagai bentuk usaha pendoktrinan yang dilakukan oleh Orde Baru (Antari & Liska, 2020).

Pada saat memasuki era reformasi, terdapat transformasi pada usaha penerapan nilai Pancasila dan Semangat kebangsaan. Kurikulum Pendidikan pada mata pelajaran PPKn disekolah mengalami peningkatan baik dari masa ke masa, begitu pula mata kuliah umum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi meendapati pergantian. Materi yang dibahas pada masa awal orde baru dirubah dengan materi-materi yang jauh lebih bagus dan cocok dengan tujuan politik Orde Reformasi. Didalam Kurikulum PPKn terdapat kurikulum sekolah pada tahun 1994 yang terlalu terpaku pada nilai moral Pancasila, dirubah menjadi Kurikulum PKN 2004 dan 2006 yang lebih terlihat objektif. dalam pembelajaran pendidikan formal mata kuliah Pendidikan Pancasila pada sebagian kampus telah dihapus dan digabung bersama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan hal ini seharusnya pada masa itu kurikulum Pendidikan dalam tingkat sekolah maupun perguruan tinggi menjadi suatu keunggulan tersendiri, upaya penerapan nilai Pancasila termasuk nilai Semangat kebangsaan mengalami penurunan yang sangat tinggi. Diluar dari hal itu berbagai lembaga Pendidikan formal contohnya birokrasi, masyarakat umum harusnya ikut melakukan upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan pada masa reformasi.

Reaktualisasi peran PKN

Seperti yang telah di paparkan, Indonesia pada awal tahun 1960 Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib bagi segala tingkatan Pendidikan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Sejak saat itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk dalam setiap kurikulum yang berlaku hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003.

Jika ditelaah, perkembangannya dari tahun 1960 sampai sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bertumpu pada situasi politik. Tidak dapat bebasnya dominasi dari pemerintahan politik yang dikuasai dan ambisi politik dari pemegang kekuasaan berulang kali tampak pada materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Mutmainah & Dewi, 2021).

Oleh karena itu, pada masa Reformasi sekarang ini, adanya kemauan untuk memperbaiki pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar meminimalisasi dominasi politik. Lebih lanjut,

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia hendaklah dilandaskan pada wawasan yang objektif dan nilai-nilai yang universal.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditujukan untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka dari itu Pendidikan Kewarganegaraan hanya memuat dua kompetensi/keterampilan yaitu rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Septianingrum & Dewi, 2021). Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk menyiapkan warga negara sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa serta komitmen dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan kehidupan saat ini adalah membina warga negara Indonesia yang baik, yakni warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa merdeka, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, mampu berpikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik secara damai, mematuhi hukum, disiplin, dan mampu ikut serta dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global (Regiani & Dewi, 2021).

Searah dengan misi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga harus memiliki tiga fungsi pokok yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Ketiga fungsi pokok tersebut berkaitan dengan pendapat Branson, yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowlegde*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). Perluasan ketiga fungsi tersebut menentukan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat pancamuka dan sistematis.

Oleh karena itu, bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dilandaskan pada sepuluh pilar demokrasi yang meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kerakyatan yang cerdas, pembagian kekuasaan negara, otonomi daerah, *rule of law*, pengadilan yang merdeka, kemakmuran umum, dan keadilan sosial. Tujuan dari model Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah membangun visi, sikap dan mutu perilaku para pemainnya yang demokratik dalam sosok warga negara yang baik, yaitu warga negara yang merdeka, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif, dan membangun diri bersama jaringan kerjanya menuju masyarakat belajar yang madani dan demokratik.

Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu diperbaharui yang berkaitan dengan materi di dalamnya. Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan rentan oleh pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai agama (misal masalah keyakinan dan ketaatan) dan nilai-nilai budaya bangsa. Secara konteks, sistem Pendidikan Kewarganegaraan didorong oleh pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu contohnya yaitu teknologi, dan seni; cita-cita, nilai, gagasan, prinsip dan demokrasi; masalah-masalah terkini di Indonesia; masalah keuniversalan; dan penghabluran *civic virtue* dan *civic culture* bagi masyarakat Indonesia; warga Indonesia dengan ketetapan demokrasi.

Revitalisasi selanjutnya dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kehendak untuk mengubah Pendidikan Kewarganegaraan yang melahirkan pendidikan dengan *powerful/berdaya* untuk mengajak keikutsertaan siswa dalam aktivitas sosial yang demokratis. Situasi ini berhubungan melalui cara merevitalisasi oleh strategi, cara dan trik pembelajarannya.

Setelah memahami cara menghidupkan dan meninjau kembali Pendidikan Kewarganegaraan di atas, jadi Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tugas yang amat mendasar bagi pelaksanaan materinya sebagai mata pelajaran yang diperoleh untuk membentuk nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan yang ada dalam diri siswa. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan diharuskan mengandung keyakinan yang tinggi karena terdapat pada nilai sentral (central values) Indonesia, yakni Pancasila, yang tertera di dalam keyakinan semangat kebangsaan.

Pendekatan dan Prinsip Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Penghayatan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan mendekati dua sudut pandang aturan akuisisi nilai, yaitu aspek pemasyarakatan dan keseluruhan bagian. Aturan akuisisi nilai ini, bertautan dengan bagaimana anak mendapat suatu nilai.

Pengalaman emosional dan aturan berlatih sosial, menyampaikan sudut pandang yang bertentangan dengan bagaimana anak membentuk manusia yang berakhlak atau mempunyai keyakinan. Aturan ini menyodorkan secorak ide penghayatan, yaitu: “the adoption of pre-existing, ready-made standards for right actions as one’s own”. Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalisa (pengalaman emosional), mempercayai hingga anak-anak mendapat keyakinan atau akhlak secara lanjut dari orang tuanya, lalu berusaha bertingkah sehaluan melalui cara-cara hati demi menepis perasaan kecewa.

Teori belajar sosial (social learning theory) mengemukakan bahwa anak mendapat keyakinan atau watak budi pekerti lewat reinforcement (teladan dan peneguhan). Pengikut aturan ini mengungkapkan jika anak-anak muncul dengan sikap dan aturan yang harmonis lewat acuan orang yang sempurna akal sebab para pengasuh dan pendidik mengambil tindakan “sikap yang benar” lewat konsolidasi dengan wujud kesepakatan, bela kasih (afeksi), dan pemberian lainnya. Anak-anak berlatih sesuai dengan watak dan budi pekerti secara matang lewat bentuk (modeling), melalui meninjau serta mengulang orang yang cukup sempurna akalnya dengan menjalankan watak yang patut.

Proses regenerasi juga diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan pokok isi materi pembelajaran. Pengetahuan intraseptif yang berasal dari nilai agama (yang menyangkut iman dan taqwa) masih banyak mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, hal ini berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di negara Barat yang isi materi berasal dari pengetahuan ektraseptif. Salah satu penelitian Winartputra menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia secara konsep mendapat pengaruh dari berbagai sumber yaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan ektraseptif, dan kesenian; pengetahuan intraseptif berupa agama dan Pancasila; permasalahan masa lampau di Indonesia; nilai, tujuan, konsep, praksis, dan prinsip demokrasi; permasalahan dan keterikatan terhadap perubahan dunia; dan negara Indonesia yang berdemokrasi konstitusional.

Revitalisasi lain yang dilakukan dari Civic Education Indonesia adalah cita-cita untuk merubah pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih memiliki kekuatan untuk mendorong keikutsertaan peserta didik pada kehidupan masyarakat yang demokratis. Masalah ini berkaitan dengan pembaharuan pada pendekatan, strategi, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pendidik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan didorong untuk menggunakan cara-cara yang lebih demokratis, dalam hal ini berarti pendidik bukan hanya mengajar tentang materi demokratis, tetapi dalam proses pembelajaran juga menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam suasana pembelajaran. Oleh karena itu pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai demokrasi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat (Hasanah, 2021).

Pendekatan dan prinsip pembelajaran dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada cara yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Semangat kebangsaan bangsa Indonesia dan Pancasila. Nilai-nilai

Pancasila dan semangat kebangsaan ditanamkan pada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditemui pada dua perspektif teori perolehan nilai, yaitu perspektif konstruktivisme dan sosialisasi. Teori ini memiliki hubungan dengan cara peserta didik atau seorang anak mendapatkan suatu nilai.

Social learning theory atau teori belajar sosial memiliki pandangan yang menyatakan bahwa nilai dan perilaku moral didapatkan oleh seorang anak melalui percontohan dan penguatan. Biasanya nilai dan perilaku moral seorang anak mengikuti perilaku langsung dari Orang tuanya, dan anak berperilaku sejalan dengan apa yang dia lihat dari orang tuanya untuk menghindari rasa bersalah jika tidak sejalan dengan orang tua. Teori ini didukung oleh pendapat Berk yang mengakui bahwa seorang anak mulai berperilaku yang menurutnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh orang dewasa karena baik orang tua maupun pendidik disekolah menindaklanjuti perilaku tersebut dengan sebutan "Perilaku terpuji" dan juga memberikan bentuk persetujuan, kasih sayang dan hadiah sebagai penguatan yang positif.

Pewarisan nilai masyarakat dan nilai moral seorang anak merupakan rujukan utama dari teori belajar sosial. Arah tujuan internal mereka mencerminkan internalisasi norma dan nilai tersebut. Hal tersebut memiliki arti bahwa teori belajar sosial hampir sama dengan nilai dan moral dari sudut pandang sosialisasi. Teori tersebut berbeda dengan teori perkembangan kognitif, yang menyatakan dan meyakini bahwa proses identifikasi diri dengan orangtua, percontohan, pengajaran langsung, dan proses penguatan bukanlah cara untuk membentuk manusia bermoral bagi seorang anak. Teori perkembangan kognitif memandang bahwa bukan dengan cara sederhana seperti mencontoh harapan dan aturan yang sudah ada seperti yang disampaikan dalam teori belajar sosial, melainkan perkembangan moral anak melalui pembentukan makna moral. Hal ini sependapat dengan pendapat yang diutarakan oleh (Gibbs) yaitu seorang anak dengan orientasi internal dan cenderung bertindak atas pemahaman yang matang tentang makna intrinsik atau yang mendasari norma dan nilai. Teori ini menekankan pada peran individu dalam perolehan nilai dan moral.

Dalam proses perolehan nilai dari kedua perspektif di atas, memiliki perbedaan pengaruh terhadap pendekatan dan metode pendidikan nilai yang berbeda. Pengklasifikasian pendekatan pendidikan moral dan nilai dibagi menjadi 2 yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendidikan nilai melalui pendekatan langsung lebih ditekankan sifat maupun nilai karakter dalam jangka waktu tertentu atau memadukan nilai dan sifat tersebut kedalam seluruh kurikulum. Sedangkan, pendidikan nilai melalui pendekatan tidak langsung lebih memberikan dorongan kepada anak dalam menentukan nilai mereka sendiri maupun orang lain dan membantu menentukan moral dalam pembentukan nilai mereka sendiri.

Pendekatan pendidikan nilai baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digabungkan menjadi satu dalam praktek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dengan menekankan pada kelebihan dan meminimalisir kelemahan pada masing-masing pendekatan. Untuk tingkatan sekolah yang masih dasar seperti sekolah dasar pendekatan secara langsung masih layak diberikan. Tetapi ketika peserta didik sudah bisa lebih berfikir kritis maka pendekatan nilai secara tidak langsung dapat menjadi pilihan utama untuk digunakan. Ketika menerapkan pendekatan nilai secara tidak langsung bukan berarti siswa dengan bebas menentukan nilai mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sebagai pendidik guru tetap memberikan bimbingan dalam bentuk arahan agar nantinya nilai yang dianut oleh peserta didik tidak menyimpang dari standar nilai masyarakat yang ada. Upaya penggabungan kedua pendekatan nilai tersebut sangat baik untuk dilakukan dalam mengembangkan nilai Pancasila dan semangat kebangsaan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan integrasi kedua pendekatan nilai tersebut diharapkan dalam pengembangan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dapat lebih terarah, jelas, penuh keyakinan, dan juga lebih kritis.

Untuk upaya mendukung pengembangan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan di sekolah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka diperlukan usaha proses pengajaran materi pendidikan kewarganegaraan yang lebih memiliki kekuatan. Pembelajaran akan lebih memiliki kekuatan jika diajarkan dalam suasana yang menyenangkan, bermakna, aktif, kreatif, efisien, melalui belajar dengan bekerja kelompok dan juga menguandung aktivitas sosial didalamnya.. Dari uraian diatas, kami memiliki beberapa ide dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan :

Pertama, dalam proses pembelajaran PKn sebaiknya menganddung nilai, hal ini memiliki arti pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan moral atau pembembangan nilai, sikap, dan juga moral, bukan hanya pengembangan kecerdasan dan kemampuan intelektual saja. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan memerlukan pengembangan pada rranag afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Untuk mengembangkan semangat kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan harus mengandung nilai.

Kedua, dalam proses pembelajaran PKn sebaiknya memiliki makna dalam pembelajaran, yang berarti PKn harus mampu memberikan pembelajaran yang mampu membimbing kompetensi hidup dan kemampuan peserta didik yang bermakna, bukan hanya menyampaikan sebuah informasi yang kurang memiliki manfaat bagi kehidupan peserta didik di masa depan. Bermakna disini berarti kemampuan yang diberikan dapat digunakan oleh peserta didik secara fungsional di masa depan.

Ketiga, pembelajaran PKn yang berlangsung dapat memancing atau mendorong siswa untuk dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, proses pembelajaran PKn harus lebih berpusat pada murid. Keaktifan peserta didik dapat dilihat dari berbagai aktivitas seperti menganalisis, ,proses tanya jawab, diskusi, pemcahan suatu permasalahan, dan dalam pengambilan keputusan.

Keempat, proses pembelajaran PKn yang berlangsung berlangsung dengan terpadu, terpadu dalam konsep, keilmuan, dan juga pada ranah pendidikan yang dikembangkan yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kelima, pembelajaran PKn yyang belangsung sebaiknya lebih bisa mendorong kemampuan siswa dalam berfikir menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan begitu pembelajaran yang berlangsung bukan hanya memberi kemampuan kepada siswa untuk mengingat konsep dan fakta, melainkan juga sampai dengan kemampuan untuk berpikir lebih analitis, kreatif, evaluatif, kritis dan juga reflektif. Peningkatan taraf berpikir ini sangat diperlukan dalam pembentukan semangat kebangsaan dan penanaman nilai-nilai Pancasila, dimana diharapkan nilai-nilai yang dikembangkan dapat diterima dengan penuh nalar oleh peserta didik.

Keenam, dalam suasana pembelajaran PKn sebaiknya lebih demokratis, dalam artian suasana hubungan antar peserta didik dan guru lebih terbuka, harmonis, kekeluargaan, dan juga manusiawi. Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan bukan anya sekedar konsep belaka tetapi juga pembelajaran yang dilaksanakan harus ddalam suasana yang lebih demokratis(Pudjiastuti, 2020).

Ketujuh, dalam proses pembelajaran PKn lebih baik dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan bagi peserta didik, dalam artian tidak ada tekanan dan rasa bosan, sebisa mungkin suasana yang diberikan itu suasana yang membuat siswa senang, merasa bersemangat, dan tertarik dalam mempelajari PKn. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran bukan hanya dengan lisan maupun tulisan yang diberikan oleh guru yang hanya sekedar mengingat materi, namun juga dapat menarik siswa untuk ikut aktif serta dalam proses pembelajaran mungkin dengan media pembelajaran. Pembelajaran PKn harus efektif dan efisien dalam hal ini berarti pengajaran sederhana, tidak membingungkan, tetapi juga dapat mencapai tujuan yang sudah dtentukan.

Kedelapan, proses pembelajaran PKn sebaiknya lebih mengajak siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan ini peserta didik bukan hanya mempelajari sebuah konsep semangat kebangsaan maupun nilai melainkan dapat melakukan tindakan ataupun aksi nyata di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik sebagai karakter sosial, yaitu menjadi manusia yang lebih memiliki rasa peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dan memiliki kemampuan untuk pemecahan masalah sosial yang ada dengan baik.

4. Kesimpulan

Dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila pada bangsa Indonesia pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Peran pendidikan pada saat ini masih menjadi harapan utama untuk menanamkan semangat kebangsaan dan juga kaidah-kaidah Pancasila terhadap generasi-generasi selanjutnya terutama generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pelajaran yang memiliki peranan penting, baik pada level sekolah maupun perguruan tinggi dalam menanamkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Tetapi, pada masa sebelumnya pengaruh kepentingan-kepentingan politik mempengaruhi PKn, sehingga tujuan, isi materi, dan orientasi nya sering mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik yang terjadi. Harapan yang saat ini perlu diperluas dalam materi PKn adalah tujuannya yang tidak hanya sekedar sebagai pendidikan politik, tetapi juga sebagai media untuk pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural, penanaman semangat kebangsaan dan nilai-nilai pancasila. Dalam pelaksanaannya Pkn harus bisa mengembangkan kemampuan peserta didik untuk bisa berfikir kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran mengenai masalah-masalah sosial, dan juga kemampuan untuk ikut aktif dalam proses politik dan sosial. Oleh karena itu PKn bukan hanya sekedar untuk melaksanakan nilai-nilai kewarganegaraan, namun juga harus bisa membimbing peserta didik untuk bisa lebih kritis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dengan penuh keyakinan.

Dalam penanaman nilai-nilai pancasila dan semangat kebangsaan, PKn juga perlu menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendidikan secara langsung dan pendekatan secara tidak langsung, yang mana keduanya didasari oleh prespektif sosialisasi. Dalam proses pembelajaran sebaiknya memiliki kekuatan, yakni berupa pembelajaran yang memuat nilai, demokratis, berkesan, menyenangkan, efisien, efektif, kreatif, aktif, mampu memunculkan kemampuan tingkat tinggi dalam berikfir, melalui pembelajaran dengan kerja sama. Dengan kedua pendekatan tersebut, yang didukung suasana pembelajaran yang memiliki kekuatan dan terintegrasi, diharapkan siswa dapat menerima dan dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila dan semangat kebangsaan dengan penuh keyakinan (Wiratmaja et al., 2021).

5. Daftar Pustaka

- Alaby, M. A. (2019). Membumikan Nilai Pancasila pada Generasi Bangsa. Gema Wiralodra. <http://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/article/view/75>
- Antari, L. P. S., & Liska, L. De. (2020). Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. Widyadari: Jurnal Pendidikan. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/widyadari/article/view/916>
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan. <http://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/108>
- Hasanah, U. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi millennial untuk membendung diri dari dampak negatif revolusi indutri 4.0. Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu

- Pendidikan. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/705>
- Mutmainah, S. U., & Dewi, D. A. (2021). Reaktualisasi Nilai Pancasila dan Implementasinya Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/396>
- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika. In *Jurnal Kewarganegaraan*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/zy6eiiwkwbq7ljh7lw2cchd3e/access/wayback/https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1450/pdf>
- Pudjiastuti, S. R. (2020). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah paham radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://scholar.archive.org/work/yqnc6b5bjvhnxit23mnh5po4fa/access/wayback/http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/14788/8482/>
- Rahman, A. (2018). Nilai Pancasila kondisi dan implementasinya dalam masyarakat global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/301>
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. In *Jurnal Kewarganegaraan*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/panl2qlnjvvhhdadlgr6rjpoa5e/access/wayback/https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1402/pdf>
- Rusmiati, M. N., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Nilai Pancasila pada Generasi Millennial. *Jurnal Edukasi Nonformal*. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/1913>
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4. 0. In *Jurnal ...* download.garuda.kemdikbud.go.id. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034370&val=20674&title=IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI KARAKTER DASAR PARA GENERASI MUDA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRIAL 40>
- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian ...* <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/242>
- Septianingrum, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Di Era Serba Modern. *Jurnal Evaluasi Dan ...* <https://jepjurnal.stkipalib.ac.id/index.php/hepi/article/view/31>
- Wardana, D. J., Handayani, A., Rahim, A. R., & ... (2021). Sosialisasi Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila. ... *Journal of Community ...* <http://journal.umg.ac.id/index.php/dedikasimu/article/view/2357>
- Wiratmaja, I. N., Suacana, I. W. G., & ... (2021). Penggalan nilai-nilai pancasila berbasis kearifan lokal bali dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan. In ... : *Jurnal Politik Dan ...* [ejournal.warmadewa.ac.id. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/download/3009/2116](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/download/3009/2116)